

## ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Bapak Bangsa Indonesia (*The Founding Fathers*) bercita-cita untuk dapat mewujudkan asas “kekuasaan tertinggi berada ditangan Rakyat Indonesia”. Cita-cita luhur itu lah yang mendorong para Bapak Bangsa Indonesia berjuang didalam merebut kemerdekaan Indonesia dari cengkeraman penjajah. Rakyat Indonesia diharapkan dapat menentukan jalannya roda pemerintahan secara berdaulat, melalui suatu sistem pemerintahan yang demokratis, yang diamanatkan untuk dikelola oleh para pemimpin bangsa setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui apakah implemementasi asas “kedaulatan tertinggi berada ditangan Rakyat Indonesia” sungguh-sungguh telah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya bagi Masyarakat Kota Semarang. Penulis ingin mengetahui bahwasannya kehendak dan mandat Masyarakat Kota Semarang telah dilaksanakan dengan baik oleh para penerima mandat yang berwenang, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Semarang melalui penelitian karya ilmiah ini.

Proses penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau obyek penelitian sebagaimana adanya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan bantuan data primer dan/atau data empiris sebagai data pendukung. Pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dari bahan pustaka dan/atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti, dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, serta dengan menganalisis berdasarkan Undang-Undang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didalam proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Semarang terdapat celah-celah hukum dari peraturan perundang-undangan yang ada, yang telah disalahgunakan oleh para politisi dan pejabat berwenang. Hal ini tentu merugikan Masyarakat Kota Semarang yang telah mengamanatkan suara dan aspirasinya kepada para wakil rakyat.

**Kata Kunci : Penggantian Antar Waktu, Fraksi, Partai Golkar, DPRD Kota Semarang**

## ABSTRACT

The United Republic of Indonesia is a country that upholds people's sovereignty. It has been the high ideal of the Indonesian Founding Fathers to realize the supreme power at the hands of the people of Indonesia. It was the noble ideals that encouraged Indonesian Founding Fathers to fight for Indonesia's independence from invaders. Once freedom has been attained, people of Indonesia are expected to determine the course of sovereign rule, through democratic be run by national leaders. The study aims to find out how the implementation of supreme "sovereignty in the hands of the people of Indonesia" really has been carried out well in accordance with the accepted regulations of the law, especially in the Semarang City. By means of this thesis, the writer wants to ensure that the will and mandates of the Semarang City people have been well carried out by officials, especially in regard to the process of exchanging time between the member of Golkar Party Fraction at House of Representative in the Semarang City.

In this study, the writer uses the descriptive type of research that is intended to illustrate the state of the subjects and objects as they are. The research method use normatif juridical methods with primary or empirical data assistance as support data. The normatif juridical approach is a method of legal research conducted by examining from library or secondary data as basis for research, by conducting a search of the rules and literatures relating to the subjects of research and analyzing by rules.

The findings suggest that in the process of exchanging time between the member of the Golkar Party Fraction at House of Representative in the Semarang City, there are legal loopholes in the existing regulations that have been abused by politicians and officials. This would be certainly be to the detriment of the Semarang City's people who have commissioned their voices and aspirations for the people's representatives.

**Key Word : Exchanging time, Fraction, Golkar Party, House of Representative in the Semarang City**